

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta. Erlangga.
- Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 8. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- <http://www.palembang.go.id/direktori/9/dinas/halaman/3>
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Uji\\_hipotesis](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Uji_hipotesis)
- <http://palembang.tribunnews.com/2017/10/08/melalui-aplikasi-e-sakip-masyarakat-bisa-pantau-kinerja-opd-kota-palembang> (di akses hari jumat 26 maret 2019 pukul 22:46)
- [https://www.palembang.go.id/berita/506/delapan-kali-berturut-turut-palembang-raih-wtp\(di akses hari jumat 26 maret 2019 pukul 22:58\)](https://www.palembang.go.id/berita/506/delapan-kali-berturut-turut-palembang-raih-wtp(di%20akses%20hari%20jumat%2026%20maret%202019%20pukul%2022:58))
- Hehanussa, Salomi J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Ambon)*. *Jurnal, UNISSULA*.
- Mulyana, Budi. 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1. Mei 2006*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan \_\_\_\_\_ dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan \_\_\_\_\_ dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman \_\_\_\_\_ Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang  
\_\_\_\_\_Standar Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang  
\_\_\_\_\_Standar Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
\_\_\_\_\_Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  
Daerah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  
\_\_\_\_\_Informasi Publik.

Rohman, Abdul 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9 No. 1 Unervisitas Dipengoro Semarang

Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Sanusi, Anwar, 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan 21. Alfabeta. Bandung.

Sukhemi, 2011. *Analisis Pengaruh Penyajian Neraca Daerah, Aksesibilitas, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Magister Akuntansi UGM. Hasil penelitian Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta

Wahida, N. 2015. *“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara.”* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.